



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.788.641.293.108,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.114.446.794.610,00
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp.664.785.944.524,00
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.9.408.553.974,00

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang direncanakan terdiri atas :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp.79.404.932.036,00
- b. Retribusi Daerah Rp.3.419.697.200,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.5.695.628.374,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp.25.926.537.000,00

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.79.404.932.036,00 yang terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000,00
 - b. Pajak Air Tanah sebesar Rp.1.500.000.000,00
 - c. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.50.000.000,00
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.150.000.000,00
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp.7.500.000.000,00
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.12.000.000.000,00
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp.20.397.850.000,00
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp.23.274.450.282,00
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.419.697.200,00 yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp.2.354.747.200,00
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.445.750.000,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp.619.200.000,00
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.695.628.374,00. Yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp.5.695.628.374,00
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.25.926.537.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro sebesar Rp.3.500.000.000,00
 - b. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.1.426.537.000,00
 - c. Pendapatan BLUD sebesar Rp.21.000.000.000,00,00

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang direncanakan terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.633.138.459.000,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.31.647.485.524,00

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.633.138.459.000,00 yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa sebesar Rp.51.330.965.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 37.682.809.000,00
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.418.962.134.000,00
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.125.162.551.000,00
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.31.647.485.524,00 yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.9.568.984.631,00
- b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp.868.576.180,00
- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp.21.209.924.713,00

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang direncanakan terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.9.408.553.974,00.

Pasal 9

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.836.962.995.231,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi sebesar Rp.702.980.720.799,00
- b. Belanja modal sebesar Rp.25.632.189.187,00
- c. Belanja tidak terduga sebesar Rp.3.506.393.221,00
- d. Belanja transfer sebesar Rp.104.843.692.024,00

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang direncanakan terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp.437.995.527.304,00
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.244.406.415.495,00
 - c. Belanja hibah sebesar Rp.19.983.778.000,00
 - d. Belanja bantuan sosial sebesar Rp.595.000.000,00
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.437.995.527.304,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.290.558.759.748,00
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.130.380.275.805,00
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.16.269.534.097,00
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.185.357.654,00
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.601.600.000,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.244.406.415.495,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang sebesar Rp.51.474.070.880,00
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp.103.897.359.095,00
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.10.451.475.622,00
 - d. Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp.15.676.248.000,00
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.808.560.000,00
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp.37.083.140.000,00
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebesar Rp.4.015.561.898,00
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp.21.000.000.000,00.

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.983.778.000,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.2.080.048.000,00
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp.3.271.900.000,00
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp.12.905.270.000,00
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.726.560.000,00
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.595.000.000,00 yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang direncanakan terdiri atas :
- a. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.6.120.553.277,00
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung sebesar Rp.7.451.875.000,00
 - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.12.049.814.800,00
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.9.946.110,00
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.120.553.277,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp.9.065.590,00
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.181.251.435,00
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp.14.553.946,00
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp.5.748.349,00
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.2.381.583.918,00
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca sebesar Rp.299.354.935,00
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp.1.583.884.560,00
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp.190.942.107,00
 - i. Belanja Modal Komputer sebesar Rp.1.072.737.576,00
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebesar Rp.300.000.000,00
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.55.388.929,00
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp.24.817.056,00
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga sebesar Rp.1.224.876,00
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.451.875.000,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp.7.301.875.000,00
 - b. Belanja Modal Monumen sebesar Rp.150.000.000,00
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.049.814.800,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp.11.599.814.800,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp.450.000.000,00

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.946.110,00 yang terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Pasal 12

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.506.393.221,00 yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang direncanakan terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil sebesar Rp.8.282.462.924,00
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp.96.561.229.100,00
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.282.462.924,00 yang terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.7.940.493.204,00
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.341.969.720,00
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.96.561.229.100,00 yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 14

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.48.321.702.123,00 yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.53.321.702.123,00
- b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.5.000.000.000,00

Pasal 15

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.53.321.702.123,00 yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.53.321.702.123,00.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00.

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.48.321.702.123,00.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.48.321.702.123,00.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 8 Januari 2026
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 8 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd

MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YAKUB ARIFIN, S.H., M.H.
NIP. 19810112 201101 1 003.



KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114.446.794.610,00
4.1.01	Pajak Daerah	79.404.932.036,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	750.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00
4.1.01.09.003.00001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	150.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.500.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	7.500.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	7.500.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	20.397.850.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.200.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	300.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	900.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	18.840.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	17.640.000.000,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1.200.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	240.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	240.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	100.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	17.850.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	17.850.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.274.450.282,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	23.274.450.282,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	23.274.450.282,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.532.631.754,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	13.532.631.754,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	13.532.631.754,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.419.697.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.354.747.200,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.599.747.200,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.599.747.200,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	55.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	400.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	188.600.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	211.400.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	445.750.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	445.750.000,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	145.750.000,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	619.200.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	600.000.000,00
4.1.02.03.008	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	19.200.000,00
4.1.02.03.008.00001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	19.200.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.695.628.374,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.695.628.374,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.695.628.374,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.695.628.374,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.926.537.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.426.537.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.426.537.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.426.537.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.000.000.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.000.000.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	664.785.944.524,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	633.138.459.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	51.330.965.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	51.330.965.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	51.330.965.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	37.682.809.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	20.495.278.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	16.476.701.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	3.885.763.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	132.814.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	12.978.043.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	9.637.589.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	0,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	55.527.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	2.184.199.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	848.322.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	252.406.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	4.209.488.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	4.209.488.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	418.962.134.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	405.388.594.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	405.388.594.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	13.573.540.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	3.609.302.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.564.238.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	125.162.551.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	125.162.551.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	44.967.450.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	682.500.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.765.100.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.445.860.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.195.858.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.015.596.000,00
4.2.01.09.002.00036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	63.075.788.000,00
4.2.01.09.002.00037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	57.000.000,00
4.2.01.09.002.00039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.421.899.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.647.485.524,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	31.647.485.524,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.647.485.524,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.568.984.631,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	868.576.180,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.209.924.713,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.408.553.974,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.408.553.974,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.408.553.974,00
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.408.553.974,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.408.553.974,00
	Jumlah Pendapatan	788.641.293.108,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	702.980.720.799,00
5.1.01	Belanja Pegawai	437.995.527.304,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	290.558.759.748,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	202.004.979.026,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	139.150.775.866,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	62.854.203.160,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.373.696.901,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.902.769.733,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.470.927.168,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.689.238.791,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.636.238.791,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	53.000.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.484.967.403,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.597.977.453,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.886.989.950,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.346.258.306,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.630.076.515,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	716.181.791,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.866.982.096,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.263.144.262,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.603.837.834,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.515.322.227,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.477.972.401,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	37.349.826,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.482.768,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.198.531,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.284.237,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.973.267.336,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12.864.541.962,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.108.725.374,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	496.353.973,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	343.582.244,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	152.771.729,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.484.941.052,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.030.177.936,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	454.763.116,00
5.1.01.01.012	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	303.269.869,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	303.269.869,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	130.380.275.805,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	49.172.543.555,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	49.172.543.555,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	980.000.000,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	980.000.000,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.695.566.250,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.695.566.250,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.532.166.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	75.475.166.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	57.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.269.534.097,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	149.367.135,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	149.367.135,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	148.000.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	148.000.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	84.460.320,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	84.460.320,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.153.674.640,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.153.674.640,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	142.264.836,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	142.264.836,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.486.056,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	52.486.056,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	286.990.000,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	286.990.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.441.291.110,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	95.290.928,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.500.045,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	13.500.137,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.328.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.736.960.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.736.960.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	147.000.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	147.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.357.654,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.939.999,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.939.999,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.971.600,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.971.600,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.469.536,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.469.536,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.052.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.052.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.057.279,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.600,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.600,00
5.1.01.05.007	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.375.920,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	1.375.920,00
5.1.01.05.008	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	121.680,00
5.1.01.05.009	Belanja iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	365.040,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.406.415.495,00
5.1.02.01	Belanja Barang	51.474.070.880,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	51.466.252.546,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	19.601.295,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	378.423.821,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	36.825.340,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	54.233.917,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.124.820,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	33.103.545,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.583.639.014,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	18.504.638,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.743.464,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	749.468.102,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	791.851.563,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.205.309.752,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	113.879.724,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	780.837.372,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.689.167.224,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.691.294.710,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	13.550.315,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.042.554,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	214.642.856,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	229.884.011,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.107.747.354,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.048.500,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.937.923.443,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20.515.213.140,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.278.783.431,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	72.879.190,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.681.812.008,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.529.652.238,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.312.270,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	142.534.125,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	52.612.460,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.052.750,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	12.801.938,00
5.1.02.01.001.00068	Belanja Pakaian Siaga	4.282.810,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	233.964.615,00
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	21.138.237,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	135.366.000,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.818.334,00
5.1.02.01.004.00120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7.818.334,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	103.897.359.095,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	76.086.544.994,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	65.852.165,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	819.730.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.284.855.663,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.900.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.049.349.536,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	81.593.478,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	8.400.000,00
5.1.02.02.001.00009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.000.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	69.300.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	431.900.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.200.000.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.202.852.479,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	277.600.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	135.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	48.000.000,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	104.400.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.221.900.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.442.417.305,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.034.400.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	885.900.000,00
5.1.02.02.001.00032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	198.000.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.888.400.000,00
5.1.02.02.001.00034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	270.000.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	112.800.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	54.000.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	25.200.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	469.000.000,00
5.1.02.02.001.00043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	159.978.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	821.395.932,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	118.796.008,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	995.922.321,00
5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	86.400.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	266.457.480,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	16.288.763.991,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	260.507.927,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.980.968.552,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	17.612.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	381.142.303,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	115.763.854,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	82.900.000,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	393.586.000,00
5.1.02.02.001.00083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	6.894.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	3.598.800.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	378.000.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	6.655.800.000,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	1.452.600.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	8.717.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.877.194.959,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.258.922.496,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	16.255.209.600,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	674.587.200,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	168.475.663,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.500.000.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1.020.000.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.068.756.026,00
5.1.02.02.004.00022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.384.410,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.377.089,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	150.527.025,00
5.1.02.02.004.00040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	210.358.773,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	443.594.642,00
5.1.02.02.004.00127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	37.998.060,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	56.719.928,00
5.1.02.02.004.00404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	2.543.449,00
5.1.02.02.004.00453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	134.252.650,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	688.061.775,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00
5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	129.753.686,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146.744.964,00
5.1.02.02.005.00011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.461.200,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	158.234.650,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	40.867.275,00
5.1.02.02.005.00046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	60.000.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.452.220,00
5.1.02.02.007.00030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	3.452.220,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.204.250.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.951.250.000,00
5.1.02.02.008.00009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	50.000.000,00
5.1.02.02.008.00018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.203.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	50.000.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	400.000.000,00
5.1.02.02.011.00002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	400.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.519.099.121,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	919.442.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	599.657.121,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.451.475.622,00
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	150.000.000,00
5.1.02.03.001.00004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	150.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.143.658.984,00
5.1.02.03.002.00009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	257.656.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	319.690.000,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.154.921.400,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	408.210.000,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	55.500.000,00
5.1.02.03.002.00040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.336.887.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	246.440.000,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	22.837.533,00
5.1.02.03.002.00137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	22.766.100,00
5.1.02.03.002.00195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	115.352.000,00
5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	129.180.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	53.978.951,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.129.817.000,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	744.817.000,00
5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.385.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.027.999.638,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	800.000.000,00
5.1.02.03.004.00010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00
5.1.02.03.004.00074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.004.00123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	127.999.638,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	15.676.248.000,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.676.248.000,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.515.798.000,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.160.450.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	808.560.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	808.560.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	246.600.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	561.960.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	37.083.140.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	36.919.390.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	36.416.890.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	502.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	163.750.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	81.250.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.015.561.898,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.015.561.898,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.015.561.898,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.000.000.000,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.000.000.000,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	19.983.778.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.080.048.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.080.048.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.080.048.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.271.900.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.641.900.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.641.900.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	630.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	630.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.726.560.000,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.726.560.000,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.726.560.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	12.905.270.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.730.560.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.730.560.000,00
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.683.850.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.683.850.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.490.860.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.490.860.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	595.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	595.000.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	595.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	595.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	25.632.189.187,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.120.553.277,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	9.065.590,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	9.065.590,00
5.2.02.01.003.00014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	9.065.590,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	181.251.435,00
5.2.02.02.002	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	181.251.435,00
5.2.02.02.002.00001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	181.251.435,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	14.553.946,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	14.553.946,00
5.2.02.03.003.00010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.307.715,00
5.2.02.03.003.00021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	11.246.231,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.748.349,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.748.349,00
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.748.349,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.381.583.918,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	42.000.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	42.000.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.339.583.918,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	1.851.836.821,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.541.247,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	265.217.564,00
5.2.02.05.002.00005	Belanja Modal Alat Dapur	19.369.092,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	116.697.085,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	82.922.109,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	299.354.935,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	299.354.935,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	299.354.935,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.583.884.560,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.583.884.560,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	83.884.560,00
5.2.02.07.001.00015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.500.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	190.942.107,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.003.00015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	40.000.000,00
5.2.02.08.008	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	150.942.107,00
5.2.02.08.008.00006	Belanja Modal Peralatan Umum	150.942.107,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.072.737.576,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	922.583.608,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	922.583.608,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	150.153.968,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	147.397.538,00
5.2.02.10.002.00005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.756.430,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	300.000.000,00
5.2.02.13.001	Belanja Modal Sumur	300.000.000,00
5.2.02.13.001.00003	Belanja Modal Sumur Lainnya	300.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	55.388.929,00
5.2.02.15.003	Belanja Modal Alat SAR	55.388.929,00
5.2.02.15.003.00002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	55.388.929,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	24.817.056,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	24.817.056,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	24.817.056,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.224.876,00
5.2.02.19.001	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.224.876,00
5.2.02.19.001.00002	Belanja Modal Peralatan Permainan	1.224.876,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.451.875.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.301.875.000,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.301.875.000,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	1.781.875.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.120.000.000,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	400.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	150.000.000,00
5.2.03.02.001	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	150.000.000,00
5.2.03.02.001.00002	Belanja Modal Tugu	150.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.049.814.800,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	11.599.814.800,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	10.699.814.800,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	10.699.814.800,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	900.000.000,00
5.2.04.01.002.00013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	900.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	450.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	450.000.000,00
5.2.04.02.007.00003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	450.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.946.110,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	9.946.110,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	9.946.110,00
5.2.05.01.001.00001	Belanja Modal Buku Umum	926.160,00
5.2.05.01.001.00002	Belanja Modal Buku Filsafat	621.116,00
5.2.05.01.001.00003	Belanja Modal Buku Agama	878.382,00
5.2.05.01.001.00004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	771.798,00
5.2.05.01.001.00005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	2.278.644,00
5.2.05.01.001.00006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.645.590,00
5.2.05.01.001.00007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.460.908,00
5.2.05.01.001.00008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	707.484,00
5.2.05.01.001.00009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	656.028,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.506.393.221,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.506.393.221,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.506.393.221,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	3.506.393.221,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	3.506.393.221,00
5.4	BELANJA TRANSFER	104.843.692.024,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.282.462.924,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.940.493.204,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.940.493.204,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.940.493.204,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	341.969.720,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	341.969.720,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	341.969.720,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.561.229.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	96.561.229.100,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	96.561.229.100,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	51.330.965.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	45.230.264.100,00
	Jumlah Belanja	836.962.995.231,00
	Total Surplus/(Defisit)	-48.321.702.123,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	53.321.702.123,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53.321.702.123,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	53.321.702.123,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	53.321.702.123,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	53.321.702.123,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	48.321.702.123,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Labuhanbatu Selatan, 8 Januari 2026

Bupati

ttd

Fery Sahputra Simatupang